



PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 16/DPRD/2023

TENTANG

PENETAPAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2024

PIMPINAN DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah memuat daftar urutan prioritas rancangan peraturan daerah yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran;
 - b. bahwa agar pembentukan peraturan daerah dapat disusun secara terencana, terpadu dan sistematis dengan mempertimbangkan/memperhatikan kebutuhan dan skala prioritas serta kewenangan daerah, diperlukan perencanaan program pembentukan peraturan daerah;
 - c. bahwa Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf b diatas, disusun dengan mempertimbangkan jumlah dan bobot serta meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam penyusunan peraturan daerah yang dituangkan dalam bentuk Keputusan DPRD;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6780);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
9. Peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 100).

- Memperhatikan :
1. Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 100.4.2.4/5315/RO-KUM tanggal 17 November 2023 perihal : Daftar Usulan Program Pembentukan PERDA Tahun 2024;
 2. Surat Badan Pembentukan PERDA DPRD Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 1002.1.6/15/BAPEMPERDA/XI/2023 tanggal 16 November 2024 Hal : Propemperda Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024;

3. Hasil Musyawarah dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat ke-49 Masa Persidangan I Tahun 2023 Tanggal 21 November 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 sebanyak 14 (empat belas) Rancangan Peraturan Daerah;
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari:
1. 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah yang merupakan Usul Inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
2. 13 (tiga belas) Rancangan Peraturan Daerah yang Merupakan Usulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- KETIGA : Program Pembentukan Peraturan Daerah di maksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pembiayaan untuk menunjang pelaksanaan Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum dalam diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 21 November 2023



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
WAKIL KETUA

SYARIF AMIN MUHAMMAD

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024
 Nomor : 16/DPRD/2023
 Tanggal : 21 November 2023

RAPERDA USULAN INISIATIF DPRD

No	Judul Raperda	Status		Pengusul	Keterangan
		Baru	Perubahan		
1	2	3	4	5	6
1.	Fasilitasi Penyelenggaraan Pondok Pesantren	Baru	-	Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Barat	Usulan Lanjutan

RAPERDA USULAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

No.	JUDUL RAPERDA	STATUS		INSTANSI	Catatan
		Baru	Perubahan		
1	2	3	4	5	7
1.	Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda)	Baru	-	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Usulan Baru
2.	Perubahan Bentuk Hukum Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat (Perseroda)	Baru	-	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Usulan Baru

3.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025	Baru	-	BadanKeuagandan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Kumulatif Terbuka
4.	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran. 2024	-	Perubahan	BadanKeuagandan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Usulan Perubahan
5.	Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Baru	-	BadanKeuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Usulan Baru

No.	JUDUL RAPERDA	STATUS		INSTANSI	Catatan
		3	4		
1	2	3	4	5	
6.	Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Pada Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Perseroda)	Baru	-	Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Usulan Baru
7.	Rencana Pembangunan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) Provinsi	Baru	-	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat	Usulan Baru
8.	Pemajuan Kebudayaan Daerah	Baru	-	Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat	Usulan Baru
9.	Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat	Baru	-	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat	Usulan 2023 diajukan kembali
10.	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	-	Perubahan	Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat	Usulan 2023 diajukan kembali
11.	Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Kalimantan Barat	Baru	-	Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Barat	Usulan 2023 diajukan kembali
12.	Pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Baru	-	Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat	Usulan 2023 diajukan kembali
13.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2045	Baru	-	Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat	Usulan tambahan

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 21 November 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



WAKIL KETUA,

SYARIF AMIN MUHAMMAD

